

Tanggapan atas Tanggapan Tulisan Saya (2-Habis)

Globalisasi: Pudarnya Bangsa-Negara?

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

Saya kira ~~menjawabnya~~ terletak pada watak paradoks pada nasion(alisme) itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, ia produk asing dan sekaligus jati dirinya yang utama ialah memusuhi kekuatan asing yang melahirkannya sendiri. Selain menjadi *produk*, nasion(alisme) juga sekaligus merupakan *proses* globalisasi.

Romo Mangunwijaya, seperti banyak cendekiawan lain, sudah menjelaskan dengan canggi bagaimana globalisasi menggunakan-cung-cang dan mentransformasikan nasion menjadi pascanasion. Yang belum diuraikan Romo itu ialah bahwa globalisasi bukannya baru muncul sekarang dan merombak nasion. Globalisasi itu sudah terjadi lama dan ikut membentuk nasion yang sekarang dirombaknya. Dialektika dan paradoks seperti ini layak diperhatikan dengan serius.

Karena itu, selain ada dua gelombang atau generasi terbentuknya nasion(alisme) seperti saya sebut dalam tulisan terdahulu, kita dapat berbicara tentang lebih dari satu gelombang globalisasi. Yang pertama, menghasilkan globalisasi kebudayaan Cina dan India. Yang kedua, membantu proses pembentukan kolonialisme dan nasionalisme generasi kedua (lihat tulisan saya terdahulu). Dan kini, pada globalisasi gelombang ketiga, kita menyaksikan rontoknya batas-batas *imaginative nation*.

Belahan terakhir dari tulisan ini secara khusus akan menimbang beberapa pokok pemikiran Romo Mangunwijaya tentang gelombang pascanasional. Kemudian akan saya sebutkan beberapa implikasi besar dari pemikiran Romo yang radikal tersebut.

Evolusi Modernitas

Dalam banyak hal pemikiran Romo Mangunwijaya dapat dianggap berada dalam suatu keluarga besar pemikiran kaum modernis tentang evolusi progresif dalam sejarah umat manusia. Diungkapkan dalam satu kalimat yang ringkas dan bersahaja, pandangan optimis ini pada intinya yakin bahwa sejarah umat manusia senantiasa bergerak ke arah perbaikan dan kesejahteraan bagi semua.

Kalau ternyata ada banyak hal yang pada masa ini masih memprihatinkan atau justru lebih

brengsek dibanding dulu, maka menurut Romo Mangunwijaya hal itu hanya persoalan waktu, "prinsip membutuhkan waktu untuk pelaksanaannya". Hal yang sama dapat diungkapkan mereka yang fanatik sosialisme atau komunisme walaupun sesudah kejadian dramatik di Eropa Timur belakangan ini.

Walaupun tidak seyakini dan seoptimis Romo Mangunwijaya, saya punya lebih banyak alasan untuk menyetujui daripada menyangkal pandangannya. Juga, ketika Romo menandakan, "Bagaimanapun RI dengan segala kekurangannya lebih baik daripada kerajaan Mataram Sunan Amangkurat I atau Hindia Belanda. Republik secara prinsip adalah fase yang lebih demokratis dan lebih manusiawi dibanding kerajaan".

Walaupun pandangan demikian tidak bisa ditampik, barangkali masih perlu ditambahkan dengan kewaspadaan kritis secukupnya. Ungkapan normatif seperti "lebih manusiawi" dan "lebih baik" dalam kutipan di atas adalah ungkapan milik kita yang hidup di zaman replublik modern dengan segala bias kita. Mungkin kita sedang menghibur diri sendiri dengan zaman kita ini.

Kewaspadaan kedua yang patut mengiringi optimisme Romo Mangunwijaya ialah kepincangan setengah-global setengah-nasional. Progresi sejarah yang dibicarakan Romo secara global dan abstrak tidak boleh membuat kita dari kenyataan empirik bahwa tidak semua golongan warga dunia ini menikmati buah globalisasi dengan kuantita, kualita, tempodan ruang yang berimbang, adil dan merata. Hingga sekarang masih kita saksikan bagaimana kemajuan global beberapa pihak di bumi ini dimungkinkan berkat penderitaan global secara terpaksa pada pihak lain.

Membandingkan mana yang "lebih baik" dari dua zaman yang berbeda jauh dapat mengundang perdebatan tanpa akhir. Dari uraian Romo Mangunwijaya kita mendengar penilaiannya tentang generasi 28 yang "lebih maju" ketimbang generasi 45 dan 66. Artinya, sejarah peradaban tidak selalu "maju" ke perbaikan.

Dua sejarawan top kita, Abduracman Suryomiharjo dan Kun-

Oleh
Ariel Heryanto

towijoyo, sedih merenungkan bagaimana Soekarno yang di zaman penjajah Belanda dulu jelas-jelas subversif mengancam negara hanya dihukum 2 tahun, sedangkan Bambang Subono dan Bambang Isti Nugroho yang cuma menjual novel serta berdiskusi ternyata pada 1989 dihukum pidana subversif 7 dan 8 tahun. Buku *Sang Pemula* dan *Hikayat Sitti Maria* yang ditulis orang pra-Indonesia pada abad lalu dan diterbitkan secara bebas pada zaman penjajahan Belanda justru dilarang pada masa-masa lampau di sepanjang sejarah kita ada benda sejenis apa yang pada 1990 ini disebut "litsus".

Konsep Pasca-Indonesia

Salah satu daya tarik dari gagasan Romo Mangunwijaya ialah konsepnya tentang pascasuku selain pasca-Indonesia. Katanya, "... yang kita lihat sehari-hari dalam masyarakat kita sesudah 1945 sudah beriklim pascasuku, pasca-Melayu, pasca-Jawa, pasca-Ambon, pasca-Budi Utomo".

Kutipan seperti itu lebih tepat disebut sebuah angan-angan ketimbang kesaksian atas gejala yang dapat kita lihat sehari-hari. Unsur ras dan kesukuan bukan sekedar "masih ada sisa-sisanya" dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi justru menjadi salah satu primadona, fondasi atau tiang penyangga terpenting dari stabilitas tata masyarakat dan pembangunan nasional.

Sepertinya sudah menjadi keyakinan atau pepatah umum di dalam masyarakat, figur pucuk pimpinan nasional di negeri ini harus mempunyai suku, agama, dan profesi tertentu di samping kecakapan pribadi sebagai pimpinan. Mungkin bukan sekedar kebetulan jika di sepanjang sejarah negeri ini baru pada masa Orde Baru ini tidak ada menteri pada kabinet pembangunan ataupun jenderal keturunan Cina. Sementara pada bidang ekonomi mereka tumbuh menjadi-jadi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Satu persoalan lagi dari gagasan Romo Mangunwijaya yang perlu dikaji secara kritis dan tajam ialah konsepsinya tentang menjadi

"manusia pasca-Indonesia tidak berarti kehilangan keindonesiannya". Pernyataan ini menarik jika didengarkan selintas, tapi kabur bila direnungkan lebih serius.

Pertama-tama harus dipertanyakan dulu apa yang dimaksudkan Romo Mangunwijaya dengan keindonesiaan, agar dengan demikian kita dapat menguji kebenaran atau kekeliruan pendapatnya.

Romo Mangunwijaya berkali-kali menggunakan kiasan *metaforsis* kepompong menjadi kupu untuk menjelaskan transformasi sosial dari suku menjadi nasion atau dari nasion menjadi pascanasion. Bagaimana kiasan itu dapat digunakan untuk memahami gagasannya tentang manusia pasca-Indonesia yang tidak kehilangan keindonesiaannya? Apakah seperti kupu yang pascakepompong? Kupu yang "tidak kehilangan kepompongannya"? Betapa ganjil!

Kupu bukanlah kepompong plus (sesuatu). Dengan bermetaforsis, seekor kupu tidak bisa tidak harus kehilangan kepompongnya! Harimau bukan kucing besar. Mobil bukanlah dokar yang pakai bensin. Film bukanlah sandiwara panggung yang direkam dan dipertontonkan kembali dengan teknologi. Orang dewasa bukanlah bayi yang bertubuh besar dan berusia panjang. Kapitalisme bukan feodalisme dengan pasar bebas.

Menjadi Indonesia, minimal dalam bangunan konsep, bukanlah menjadi Bali, Sunda, Batak, atau Jawa plus sesuatu yang lain. Menjadi Indonesia berarti menjadi manusia baru, berarti pudarnya manusia lama pra-nasion.

Kesukuan mungkin tidak sepenuhnya lenyap dalam nasionalitas, tapi esensi dan makna praktisnya secara fundamental tidak mungkin sama dengan kesukuan di zaman pra-nasion! Seperti munculnya teknologi film dan video tidak menenyapkan, tapi merombak secara fundamental baik eksistensi maupun esensi sandiwara panggung. Di zaman nasionalisme, kesukuan menjadi produk rekayasa seperti yang kita saksikan di Taman Mini Indonesia Indah, pawai Bhinneka Tunggal Ika atau brosur pariwisata.

Pernyataan Romo tentang pascanasional yang tidak kehilangan nasionalitasnya mengingatkan saya akan berbagai ucapan yang

kini populer; "silakan kritik, tapi..." atau "demokrasi, tapi...". Seakan-akan tidak rela atau khawatir dengan pudarnya nasionalisme, Romo Mangunwijaya ingin melestarikan atau mengabadikan "nasion(alisme)" biarpun badai pascanasional telah mengglobal.

Pernyataan Romo bahwa dalam transformasi pascanasional "identitasnya sama tapi gaya hidup lain" sangat menyedihkan saya. Seakan-akan evolusi sejarah umat manusia hanya evolusi gaya hidup, tanpa disertai perombakan esensi kemanusiaan. Seakan-akan Romo Mangunwijaya tak percaya bahwa esensi masyarakat di zaman kerajaan Mataram, republik Indonesia, hingga pascanasional tidak sama. Jika demikian perubahan sejarah tak ada artinya, sebab penindasan berlangsung terus, hanya gayanya saja yang berubah-ubah.

Implikasi Raksasa

Akhirnya sampailah kita pada pokok terakhir dalam uraian ini. Kita akan bersama-sama mencatat sejumlah implikasi berskala besar-besaran yang sedang menghadang kita pada tahap sejarah globalisasi dan pascanasional ini.

Apa yang terjadi seandainya bernasion (sebagai bangunan fiksi atau/dan fakta, ada dan/atau mengada-ada) sedang dan akan semakin memudar? Imajinasi kita pada masa tak mungkin merentang atau menampilkan gambaran seutuhnya. Tapi kita dapat mengantisipasi tiga implikasi besar berjangka-dekat; (a) politik, (b) budaya, dan (c) keilmuan. Ketiganya akan dirinci satu per satu di sini.

Implikasi terpenting dari mudarnya nasion dari segi politik ialah babak-belurnya bangunan negara. Ada atau tiadanya nasion bukan saja menjadi dasar bagi ada atau tiadanya kebudayaan nasional. Nasion juga menjadi sumber pokok legitimasi negara modern. Legitimasi inilah yang memungkinkan negara memunguti pajak, sumber daya alam dan manusia. Bahkan menuntut kesetiaan warganya untuk mati atau membunuh manusia lain.

Abruknya negara kolonial Hindia Belanda antara lain disebabkan oleh pudarnya legitimasi mereka, karena munculnya legitima-

(Bersamb. ke Hal. VI kol 1)

Globalisasi....

si baru (nasionalitas) dari kelompok lain untuk menguasai dan melanjutkan operasi bangunan negara yang sama.

Bagaimanakah tampang masyarakat kita seandainya bangsa-negara sudah memudar? Orang tidak lagi punya kebangsaan atau kewarganegaraan? Seperti halnya banyak orang di negeri Industri hidup tanpa memiliki atau dimiliki salah satu agama resmi yang diwajibkan di Indonesia? Bagaimanakah wujud hukum dan peradilan, polisi dan perwakilan? Harus kemanakah para pegawai negeri kita? Masih adakah penjara dan istana? Betapa sulit membayangkannya pada masa ini. Apalagi jika kita membayangkan dengan rasa takut.

Buku *Megatrends 2000* yang sedang ngetop dan ngetrend di antara cendekiawan liberal di Indonesia menggambarkan sosok dunia sebagai sebuah pasar besar daripada kumpulan bangsa-negara. Walaupun saya tidak sependapat dengan banyak hal dari buku itu, saya yakin berbagai data empirik kuantitatif dalam buku itu dan gambaran masa depan pascanasional dari penulisnya dapat merangsang imajinasi yang berguna bagi mereka yang tidak takut menghadapi perubahan besar-besaran di masa depan.

Ada beberapa implikasi kebudayaan yang berjangka lebih dekat dengan kita. Pertama, semakin lama akan terdengar semakin membazir bila orang berpidato tentang ancaman terhadap kebudayaan nasional. Misalnya, perilaku seksual inkonvensional atau ideologi non-

Pancasila. Bukan karena pada waktu itu kebudayaan nasional sudah sangat kuat dan tahan serangan dari luar, tetapi karena kebudayaan nasional itu sudah diakui tidak pernah ada (lagi) dan sehingga tidak dapat diancam atau perlu dilindungi lagi.

Kini kita masih mendengar adanya orang yang menyibukkan diri mencari "wajah Indonesia" dalam film atau menyusun "ilmu-ilmu sosial khas Indonesia", atau berdebat tentang teori sastra, arsitektur, atau sistem ekonomi yang khas Indonesia. Bukan saja yang dicari itu tak pernah ditemukan (karena tak pernah ada), tapi juga akan tampak betapa semakin antiknya perilaku demikian. Sementara Bakom PKB masih kerepotan menggiring kaum non-pribumi supaya menjadi Indonesia daripada kaum pribumi, yang dinamakan Indonesia itu sendiri sebentar lagi menjadi kategori sejenis fosil di museum-museum ilmu pengetahuan.

Akhirnya, bagi ilmu-ilmu sosial, apa yang kita bicarakan di atas memberikan berbagai implikasi teoritik yang menantang kaum ilmuwan sosial. Sebagai contoh kecil saja, transformasi sosial yang telah diuraikan dengan sangat bagus oleh Romo Mangunwijaya terdahulu menagih utang teoritik yang telah lama belum kita lunasi. Yakni soal porsi daya, kesadaran dan kemauan manusia dalam perubahan sosial. Sejauhmana perubahan sosial dalam sejarah ini dapat dikendalikan manusia? Sejauhmana ada "kekuatan sejarah" yang bergerak di luar kendali manusia.

Sejauhmana gelombang pas-

(Sambungan dari Halaman IV)

canasional itu merupakan perubahan sosial yang disengaja manusia? Yang direncanakan, diinginkan, dan dikendalikan? Dan, sejauhmana ada kekuatan-kekuatan lain yang menggerakkan perwujudannya, tanpa peduli apakah kita suka atau tak suka. Dengan kata lain, sejauhmana pascanasional itu akan ada atau mengada dan sejauhmana pascanasional itu hanya ada jika "diada-adakan" manusia?

Para peserta polemik ini belum secara tegas mengkaji persoalan ini. Tetapi, asumsi dasar di bawah pernyataan-pernyataan mereka ada yang jelas. Misalnya, baik bagi Romo Mangunwijaya maupun Suripan Sadi Hutomo, perubahan sejarah berada di bawah kendali, keinginan, dan kesengajaan manusia.

Saya pribadi termasuk orang yang mempercayai bahwa selain kehendak dan kesengajaan manusia, ada banyak faktor lain yang membentuk jalannya sejarah. Kesadaran manusia memang tetap ikut menentukan perubahan sejarah. Tetapi tidak secara mutlak atau selalu sesuai rencana. Seringkali sejarah berjalan di luar rencana, keinginan atau rekayasa manusia yang cangih, berkuasa, atau luhur. Seperti kata kaum cendekia, sejarah dibentuk tapi juga membentuk manusia.

Karena itu, tanpa kehilangan optimisme dan usaha, manusia harus tetap berendah hati dengan keterbatasannya dan berwaspada secara kritis terhadap kekuatan sejarah yang bisa bergerak kencang di luar kendalinya.